

## ABSTRAK

### **Agus Muhaemin: “Kebijakan Mr Sunario Sebagai Menteri Luar Negeri Terkait Isu Konflik Palestina-Israel Tahun 1953-1955”**

Kebijakan Luar Negeri menjadi aktivitas utama dalam hubungan internasional. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif.

Permasalahan Timur Tengah, Khususnya masalah Palestina mendapat perhatian lebih bagi pemerintah Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai anti kolonialisme seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, berusaha agar Palestina bisa diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui riwayat hidup MR Sunario serta untuk mengetahui kebijakan MR Sunario sebagai Menteri Luar Negeri terkait isu konflik Palestina-Israel tahun 1953-1955. Untuk bisa memahami permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan historis, politik, ekonomi, dan militer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, adapun langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Heuristik (pencarian dan pengumpulan sumber). *Kedua*, Kritik (eksternal dan internal). *Ketiga*, Interpretasi (penafsiran). Dan yang terakhir adalah Historiografi.

Dari hasil penelitian ini perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mengatasi isu konflik Palestina-Israel tahun 1953-1955 bisa dikatakan mengalami kemajuan.

Kemajuan tersebut tak terlepas dari beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri MR Sunario, kebijakan tersebut diantaranya: 1. Memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan Palestina; 2. Mengirimkan bantuan kemanusiaan serta membangun sekolah-sekolah; 3. Memberikan pelatihan terhadap ribuan warga negara Palestina; 4. Meningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina; 5. Menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

**Kata Kunci:** Kebijakan, MR Sunario, Menteri Luar Negeri, Konflik Palestina-Israel